

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan mengenai lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan, dan bencana dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin meluas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu bukti nyata Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan warga negaranya terutama dalam memperoleh lingkungan hidup yang layak yakni telah ikut berpartisipasi dalam menandatangani Deklarasi Millenium pada KTT Millenium PBB yang dilaksanakan pada bulan September 2000. Deklarasi ini kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Program *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh 189 negara termasuk Indonesia, merumuskan delapan target pembangunan yang harus tercapai pada tahun 2015. Adapun target tersebut meliputi penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Saat ini sudah separuh perjalanan (*mid point*) pelaksanaan MDGs. Tercapainya MDGs sangat dipengaruhi oleh adanya sinergisitas antara pemerintah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, media, dan kelompok bisnis. (Taylor, 2010).

Wina Nurhayati Praja, 2015

Pembinaan Kesadaran Warga Negara Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (*The Living Environment*) Pada Masyarakat Adat Kuta

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.Upi.Edu | Perpustakaan.Upi.Edu

Begitupun dengan kondisi di Indonesia, sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat ini masih belum terlihat dan sulit dilakukan, karena setiap elemen masyarakat masih berjalan sendiri-sendiri. Hal ini terlihat pada pengalokasian anggaran maupun pembuatan kebijakan yang belum searah dengan pelaksanaan MDGs (Anna, 2012). Selain itu bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, media atau kelompok bisnis dalam penentuan kebijakan anggaran maupun peraturan belum banyak diakomodir oleh pemerintah. Salah satu akibatnya membuat arah pembangunan tidak jelas dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainability*).

Persoalan lainnya adalah sudah sekian lama MDGs berlangsung, namun pelestarian penyelamatan lingkungan belum menjadi perhatian semua pihak. Alhasil terjadi kecenderungan menurunnya proporsi luas kawasan hutan di beberapa daerah yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya konversi lahan hutan menjadi perkebunan (kelapa sawit), menjadi industri pabrik, pertambangan, *illegal logging*, dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh Andisi (2012) bahwa Indonesia saat ini lebih cocok dikenal sebagai negara bencana. Barangkali itulah ungkapan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi Indonesia saat ini.

Berbagai bencana alam selalu menimpa Indonesia, dan persoalan itu semata-mata tidak dipahami secara sosial, ekonomi dan politik (*human error, management error*). Penebangan hutan yang dilakukan tanpa memperdulikan keseimbangan ekosistem sehingga menimbulkan kerusakan alam seperti banjir bandang, eksploitasi kandungan bumi tanpa memperhitungkan harkat dan masa depan masyarakat. Bahkan kasus semburan lumpur panas Lapindo akibat pengemboran gas di Sidoarjo, kenaikan permukaan air laut, meluasnya kekeringan, banjir, menurunnya produksi pertanian, dan meningkatnya berbagai jenis penyakit yang terkait yang sudah dan akan terjadi di Indonesia. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Marita (2014), bahwa Indonesia sebagai negara yang kondisi iklim dan alamnya rentan terhadap perubahan iklim global yang dipicu oleh pemanasan global, maka Indonesia harus menyiapkan masyarakatnya untuk menghadapi kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh fenomena tersebut.

Kelestarian lingkungan hidup lebih memprihatinkan karena semakin terasa turunnya selain kualitas hidup juga kualitas habitat yang diperlukan untuk menopang kehidupan. Sebagai akibatnya semakin tercemarnya udara, tanah, dan air, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan mengalami disparitas karena rendahnya nilai terhadap masalah ekologi sosial, manusia, kebudayaan, fisik dan biologi.

Dalam sebuah artikel yang ditulis Anna (2014) dengan judul “Dilema Inovasi Sadar Lingkungan” (Kompas, 10/06/2014), mengungkapkan bahwa krisis lingkungan bukan disebabkan oleh kerusakan alam atau disebabkan salah arah terhadap aktivitas biologis dan bukan karena adanya anggapan manusia tidak ubahnya sebagai hewan yang kotor, dan bukan pula oleh sejumlah penduduk, akan tetapi semuanya ini disebabkan oleh perilaku sebagian masyarakat yang selalu ingin menang dan ingin menguasai kekayaan alam demi keuntungan yang sebesar mungkin.

Interaksi manusia dengan lingkungannya tidak lagi berpola sebagai komponen biosfer akan tetapi sebaliknya, tumbuhnya dan keberadaban manusia dikatakan sebagai penyebab rusaknya lingkungan. Lebih parah lagi muncul kesan pemerintah Indonesia telah mengorbankan kelestarian lingkungan demi dan mengatasnamakan pembangunan. Terjadinya bencana alam berupa tanah longsor dan banjir di beberapa daerah menjadi bukti nyata kurangnya perhatian pemerintah pada kelestarian lingkungan ini. Seperti terlihat pada kasus tanah longsor dan banjir bandang yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia (Jakarta, Bogor, Jatim, Jabar, Palembang, Aceh, NTT, Tangerang, dll). Padahal akar persoalannya terletak pada rusaknya ekosistem hutan. Melihat kekhawatiran tentang kerusakan alam, maka PBB melakukan konferensi. Konferensi PBB ini disebut Konferensi Bumi (*The Earth Summit*)/ tentang Lingkungan dan Pembangunan yang memberikan prioritas tinggi dalam Agenda 21 kepada peranan pendidikan. Pertemuan ini berfokus pada proses orientasi dan re-orientasi pendidikan dalam rangka membantu perkembangan nilai-nilai dan tingkah laku yang bertanggung jawab bagi lingkungan, juga untuk menggambarkan jalan dan cara melakukannya. (Bart, 1994).

Sejalan dengan pemikiran Bart, dalam penelitiannya Hartati (2012) mengungkapkan bahwa Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (*World Education on Education for All*), Forum Pendidikan Dunia (*World Education Forum*) menjadikan pendidikan merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan pendidikan ini merupakan kunci bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia, perdamaian dan stabilitas, pertumbuhan sosial ekonomi, dan pembangunan bangsa. Sehingga tujuan masyarakat Indonesia untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan dalam bidang pendidikan dapat terwujud dengan baik sesuai dengan program yang didukung oleh pemerintah.

Pada pertemuan ke-57 bulan Desember 2002, Sidang Umum PBB menyatakan Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan untuk periode 2005-2014, telah menekankan bahwa pendidikan adalah unsur yang sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terdapat tiga kajian yang saling terkait dan paling sering dikenali dalam pembangunan berkelanjutan yaitu: masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. (Syahri, 2013).

Tiga unsur ini, ditegaskan kembali dalam Konferensi Tingkat Tinggi Johannesburg sebagai tiga pilar pembangunan berkelanjutan. Dasar dan fondasi untuk keterkaitan tiga unsur ini dengan pembangunan berkelanjutan terdapat dalam dimensi budaya. Kebudayaan dan cara hidup, berhubungan, berperilaku, berkeyakinan dan bertindak yang berbeda-beda sesuai dengan konteks, sejarah dan tradisi, yang didalamnya umat manusia menjalani kehidupan mereka.

Kaitan proses dan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan untuk pembangunan berkelanjutan ESD (*Education for Sustainable Development*), penekanan pada aspek kebudayaan akan menggaris bawahi pentingnya ESD (*Education for Sustainable Development*) merupakan konsep dinamis yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan pemberdayaan manusia segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan dalam sebuah penelitian Taylor (2010, hlm. 121) Held and McGrew mengungkapkan pentingnya sebuah “*environmental citizens the central paradox is that governance is becoming increasingly a multilevel*,

intricately institutionalised and spatially diverse activity, while representation, loyalty and identity remain stubbornly rooted in traditional ethnic, regional and national communities”.

Sheller (2003) menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan bersifat dinamis dan terus berkembang. Para pelaku utama pembangunan berkelanjutan haruslah menempatkan peran mereka dalam pendidikan anak-anak, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal dan dalam kegiatan pembelajaran berbasis masyarakat. Ini berarti pendidikan haruslah berubah sehingga mampu menanggapi masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup yang kita hadapi dalam Abad ke-21. Sebagian besar masalah lingkungan hidup kita berakar dari kurangnya pendidikan kita tentang lingkungan hidup dan tentang cara-cara menuju perikehidupan yang berkelanjutan. Budaya memiliki peranan penting dalam membangun peradaban suatu bangsa. Budaya lahir karena muncul dari kebiasaan masyarakat yang membangun suatu komunitas. Budaya merupakan kekayaan luhur suatu bangsa, bangsa tercipta karena didorong oleh pertumbuhan dan perkembangan budaya.

Budaya lokal memiliki peranan penting dalam menjabarkan dan membina nilai-nilai karakter terutama yang sudah membudaya dalam lingkungan budaya lokal. Karakter budaya masyarakat tumbuh dan berkembang seiring perkembangan zaman. Kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa dilakukan dalam kehidupan nyata di lingkungan budaya sudah menjadi kekayaan khazanah budaya bangsa. Unsur-unsur budaya terdiri dari bahasa, ras, etnis, rumah adat, pakaian adat, kebiasaan, upacara adat, lingkungan/ kampung adat, makanan khas, dan senjata adat. Budaya lokal merupakan modal besar bagi pembangunan Bangsa Indonesia. Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi sebuah negara yang maju, makmur, adil, berdaulat, bermartabat, dan beradab. Adapun modal besar yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebetulnya sudah nampak pada diri bangsa Indonesia secara tidak disadari, sebagaimana ditegaskan oleh Keraf (2012, hlm. 2-3) adalah:

- a). Posisi geopolitik yang sangat strategis; b). Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati; c). Jumlah penduduk yang besar; dan d).

Kemajemukan sosial budaya, namun modal dasar dan potensi yang besar itu tidak dikelola dengan optimal dan sering disia-siakan, sehingga bangsa ini kehilangan banyak momentum untuk maju dengan cepat, sekaligus menimbulkan masalah yang kompleks.

Pendapat senada dikemukakan oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam Rachmad (2008, hlm. 12) bahwa:

Indonesia berpotensi menjadi negara besar, bila ditinjau dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan kekayaan sumberdaya alam, keanekaragaman budaya dan etnis, namun perjalanan bangsa ini ibarat mendaki sebuah gunung yang terjal, bahaya selalu mengancam, yang tidak saja diperlukan sikap kehati-hatian, tetapi juga kesabaran dan kewaspadaan.

Mengkaji kedua pendapat tersebut, Indonesia sangat berpotensi menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia internasional. Indonesia memiliki kemajemukan masyarakat dan kemajemukan budaya. Kemajemukannya itu ditandai dengan beragamnya etnik, suku, ras, bahasa, kesenian, agama atau kepercayaan, cara berpakaian, perilaku/pola hidup masyarakat, dan sebagainya. Keragaman budaya itu merupakan suatu kenyataan dan sekaligus merupakan kekayaan bangsa, yang ciri khas/ keunikannya menjadi kebanggaan kita.

Selain keberagaman etnik, keanekaragaman budaya yang lain dapat kita lihat pada kehidupan masyarakatnya terutama masyarakat perkampungan. Dimana kebudayaan tersebut berakar dari tradisi yang tertanam di masa lampau atau nenek moyangnya. Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan budaya masa lampau itu dikenal dengan masyarakat adat. Masyarakat adat yang berdiam dengan sederet keunikannya merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki bangsa. Masyarakat adat berasal dari sejumlah individu, yang berada di suatu tempat tertentu dengan sistem nilai, norma, adat istiadat/kebiasaan, yang mengatur pola interaksi antara individu anggota masyarakat.

Dipertegas oleh Soekanto (2006, hlm. 76) bahwa “Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat”. Keunikan dan keeksotisan adat istiadat dari sekumpulan masyarakat adat harus dilestarikan.

Setiap anggota masyarakat terkait harus memiliki kesadaran untuk selalu mempertahankan eksistensinya sebagai pemilik budaya yang khas atau unik. Setiap anggota masyarakat dengan kesadarannya harus mempertahankan nilai dan norma adat istiadat lingkungan masyarakatnya. Penyelenggaraan pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai berdasarkan pembangunan nasional yang hakikatnya dilaksanakan oleh bangsa meliputi seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang pendidikan yang diajarkan di sekolah adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi. Perspektif mengenai mata pelajaran PKn yang membosankan dapat semakin kuat apabila guru kurang menerapkan pembelajaran yang membangkitkan motivasi belajar. Dalam PKn salah satunya kita dibelajarkan makna kesadaran, begitupun dengan sadar mencintai lingkungan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran interdisipliner yang memiliki *leading kord political science* yang terintegratif terhadap *leading sector antropologi science* sebagai pendidikan non-formal/ *learning service*, yang dilandasi nilai-nilai Pancasila serta terorganisir dengan baik melalui tujuan pendidikan secara ilmiah. Tujuan pendidikan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 yakni:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sesuai dengan tujuan pendidikan diatas, jelas terlihat bahwa tidak hanya pendidikan formal yang menjadi tanggung jawab keberlangsungan pendidikan, tetapi juga pendidikan non-formal (*learning service*) dibutuhkan dalam menopang keberlanjutan pendidikan bangsa Indonesia. Sesuai dengan UU Sisdiknas Pasal 8

disebutkan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Ini artinya *learning service* Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan non-formal harus senantiasa diperhatikan terutama dalam berbagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Salah satu objek dari *learning service* yakni *the living environment*. Secara akademik *the living environment* ini bermuara dari Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai *action* dari PKn. Sebagai *antropologi science*, *the living environment* bagian didalamnya terutama dalam misi antropologi menciptakan masyarakat dalam beberapa kategori, yakni; transmisif, moderatif, dan inovatif. Sehingga masyarakat memiliki rasa kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

Kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan didasari karena manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Kerusakan pada lingkungan hidup pada dasarnya juga merusak pada diri manusia itu sendiri. Prinsip-prinsip *deep ecology* (Arne Naess dalam Mudhofir, 2010, hlm. 197) adalah:

1. Kesejahteraan dan perkembangan manusia dan non manusia di muka bumi memiliki nilai di dalam dirinya sendiri (seperti nilai intrinsik atau nilai inheren). Nilai-nilai tersebut tidak tergantung dari nilai non-manusia untuk tujuan-tujuan manusia.
2. Kekayaan dan keragaman bentuk-bentuk kehidupan berkontribusi pada kesadaran nilai-nilai mereka sendiri dan juga nilai-nilai inherennya (dalam dirinya sendiri).
3. Manusia tak memiliki hak untuk mengurangi kekayaan dan keragamannya kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok saja.
4. Perkembangan hidup dan budaya manusia sepadan dengan pengurangan substansial populasi manusia. Perkembangan kehidupan non manusia memerlukan pengurangan semacam ini.
5. Intervensi manusia modern atas dunia non manusia terlalu berlebihan, dan kondisi ini makin memburuk.
6. Karena itu kebijakan-kebijakan harus berubah. Kebijakan-kebijakan tersebut

mempengaruhi struktur dasar ekonomi, teknologi, dan juga ideologi. Keadaan yang dihasilkannya akan berbeda dari keadaannya semula.

7. Perubahan ideologi yang utama adalah penghormatan pada kualitas hidup (yakni berada dalam kondisi nilai inheren) bukanya mempertahankan standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul kesadaran mendalam standar hidup yang makin tinggi. Selanjutnya akan muncul kesadaran mendalam terhadap perbedaan antara yang besar dan besar sekali (*the different between big and great*).
8. Mereka yang mendukung poin-poin diatas memiliki kewajiban untuk menerapkan perubahan-perubahan mendesak tersebut, langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman konteks tersebut, diharapkan akan membangun rasa kesadaran dan perasaan memiliki sebagai bagian dari suatu bangsa. Namun pada kenyataannya kesadaran warga negara dalam melestarikan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, mengingat bukan hanya di Indonesia melainkan dunia saat ini sedang mengalami krisis lingkungan yang berakar pada kesalahan perilaku manusia yang berakar pada kesalahan perspektif manusia tentang manusia, sendiri, alam, dan hubungan antar manusia dengan seluruh alam semesta (Keraf, 2012, hlm. 123).

Begitupun Cogan dalam Sapriya (2004, hlm. 9) menambahkan delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara sehubungan dengan semakin beratnya tantangan yang harus dihadapi dimasa mendatang. Karakteristik warga negara tersebut meliputi :

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga negara masyarakat global;
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat;
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya;
4. Kemampuan berfikir kritis dan sistematis;

5. Kemauan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan;
6. Kemauan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah bisa, guna melindungi lingkungan hidup;
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak azasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb);
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional

Oleh karena itu, kesadaran warga negara sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan program atau proyek tetapi memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah, memecahkannya, membuat keputusan, memonitoring, dan mengevaluasi. Nilai-nilai budaya dan pola hidup masyarakat yang ada harus diaktualisasikan, dipertahankan, dan dikembangkan. Pendidikan karakter bagi masyarakat adat perlu didesain, diformulasikan dan dioperasionalkan melalui transformasi budaya dalam lingkungan masyarakat adat. Sehubungan dengan pentingnya pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menggelar Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa pada beberapa waktu yang lalu, dan pencaanangan tentang Pendidikan Karakter bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2014.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar peduli dan menginginkan generasi penerus bangsa Indonesia memiliki karakter dan jati diri yang sesungguhnya, kreatif, inovatif serta memiliki daya saing yang cukup tangguh serta unggul dan memiliki karakter yang berakhlakul karimah. Akan tetapi kenyataannya sampai saat ini masyarakat bangsa kita masih dihiasi oleh suatu gejala kelemahan, suatu mentalitas yang sangat tidak cocok untuk pembangunan (Budimansyah, 2006, hlm. 305). Hal ini akan berpengaruh terhadap kesadaran warga negara dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam penanaman nilai, karena koridornya *value based*, nilai tersebut harus diajarkan dalam pendidikan formal seperti PKn kemasyarakatan (*community civics*). Objek studi

civics dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi, agama, dan negara. Sebagaimana dipaparkan oleh Somantri (2001, hlm. 276) dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan (1973, hlm. 214) yang termasuk ke dalam objek studi *civics* ialah:

- a) Tingkah laku
- b) Tipe pertumbuhan berfikir
- c) Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara
- d) Hak dan kewajiban
- e) Cita-cita dan aspirasi
- f) Kesadaran (patriotism, nasionalisme, pengertian internasional, dan moral Pancasila)
- g) Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Penanaman nilai-nilai lingkungan hidup sudah diintergrasikan kepada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di dalam pendidikan formal meskipun pada proses pembelajaran belum sebagian guru PKn hanya sebatas memberikan materi saja belum sampai pada pengamalan nilai-nilai dan melestarikan lingkungan hidup. Berbicara tentang pendidikan kewarganegaraan selain di persekolahan pendidikan kewarganegaraan juga dapat kita pelajari di masyarakat. Terutama pada komunitas adat yang memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. Sebagaimana dikemukakan Cogan dalam Budimansyah dan Suryadi (2008, hlm. 5) :

citizenship education or education for citizenship.....The more inclusive term and encompasses both these in-school experiences as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organization, community organizations, the media etc, which help to shape the totality of the citizen.

Kampung Kuta adalah masyarakat adat yang masih bertahan di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Kampung adat ini dihuni masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, dengan memegang budaya pamali (tabu), untuk menjaga keseimbangan alam dan terpeliharanya tatanan

hidup bermasyarakat. Ada beberapa keunikan di kampung adat ini yang tidak dimiliki oleh kampung adat lainnya. Salah satunya terdapat ritual upacara yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya yaitu upacara adat nyuguh. Manusia itu adalah bagian dari masyarakat yang mendiami sebuah lingkungan, baik lingkungan umum maupun lingkungan yang memiliki adat khusus. Lingkungan sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Namun, tidak sedikit masyarakat yang tidak menyadari bahwa lingkungan sangat berguna bagian terpenting dari hidupnya. Sebagaimana diungkap oleh Sumaatmadja (2010, hlm. 4) bahwa “manusia sebagai suatu fenomena, termasuk manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk budaya, dan manusia dalam konteks lingkungan hidupnya.” Dalam sistem alam, manusia merupakan bagian dari alam yang berinteraksi dengan alam sebagai lingkungannya. Dengan kata lain, pada sistem alam ini manusia ada dan hidup dalam lingkungan alam. Manusia dituntut tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Dewasa ini banyak masyarakat yang menganggap bahwa dirinya adalah penguasa alam, sehingga mereka bertindak sewenang-wenang tanpa tanggung jawab dalam menggunakan dan memanfaatkan alam. Ini dapat terlihat dengan banyaknya terjadi bencana. Terutama bencana di lingkungan hidup manusia seperti longsor, banjir, erosi, hutan kebakaran, kekeringan, pencemaran, dan sebagainya. Oleh karena itu manusia wajib menyadari sebagai khalifah, bahwa kenikmatan berupa sumber daya alam yang ada di lingkungan itu bukan merupakan ajang keserakahan. Melainkan, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola dalam pemanfaatannya secara rasional.

Sebagaimana diungkap oleh Keraf (2012, hlm. 14), dalam bukunya yang berjudul *Etika Lingkungan* bahwa:

Krisis lingkungan hidup yang kita alami dewasa ini tidak hanya akibat dari meledaknya populasi dan perkembangan teknologi eksploitasi, tetapi secara mendasar bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia mengenai dirinya, alam, dan tempat manusia di dalam keseluruhan ekosistem.

Dari pendapat diatas dapat kita ketahui bahwa kerusakan dan bencana lingkungan itu disebabkan karena ulah atau perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan alam sekitar. Kepribadian individu dari setiap masyarakat, cara pandang, dan paradigma berpikir masyarakat itu sendiri sangat berpengaruh pada kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam.

Keraf menegaskan kembali dalam tulisannya (2012, hlm. 45), bahwa:

Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika *antroposentrisme*, yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta, bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekadar alat bagi pemuasan kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Bertolak dari kondisi tersebut, jelas bahwa perlunya suatu perilaku baru yang tidak hanya berlaku untuk interaksi antarmanusia, tetapi juga interaksi manusia dengan semua kehidupan di bumi termasuk lingkungan alam. Oleh karena itu, dominasi manusia terhadap lingkungan, bukan tanpa etika dan tanggung jawab, melainkan dilandasi oleh IMTAK yang menjadi kendali dari keserakahan manusia. Seperti ditegaskan oleh Sumaatmadja (2010, hlm. 96) bahwa “alam dan lingkungan dengan segala tantangannya memiliki hukum (*sunatullah*) yang mengatur keserasian, keseimbangan, dan kelestariannya.” Dalam hal pewarisan juga diperlukan kepribadian dari manusia itu sendiri, sebagaimana Sumaatmadja (2010, hlm. 21) bahwa: “Kepribadian itu merupakan *resultante* dari potensi warisan biologis dengan pengaruh lingkungan, yang mekanismenya tercermin dari dinamika individual dalam ungkapan perilaku seluas-luasnya sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Hal utama yang tentu harus dilakukan oleh manusia adalah merubah paradigma tentang pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagaimana diungkap Keraf

(2012, hlm. 176) bahwa :

Tujuan perubahan paradigma sedemikian itu adalah penting, agar sikap dan perilaku manusia menjadi lebih arif dalam memberi makna atas alam. Karena itu, manusia harus mengembangkan konsepsi tentang alam yang mengagungkan dan menghormati alam, juga menganggap alam sebagai sesuatu yang sakral dan hidup. Dengan demikian, akan melahirkan sikap yang menghormati dan peduli terhadap lingkungan. Atas dasar itu, kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan harus terus tertanam dalam diri manusia.

Seperti yang dijelaskan diatas, sikap arif dan bijaksana itu sangat diperlukan oleh individu dalam masyarakat. Begitupun di kampung Kuta ini masih mempertahankan dan menjunjung tinggi adat istiadat para leluhurnya. Bagaimana leluhurnya sangat menjaga nilai budaya adat dalam melestarikan dan menjaga lingkungan hidupnya secara arif dan bijak. Ditengah-tengah zaman modern seperti sekarang, yang cenderung manusianya tidak menghiraukan kelestarian lingkungan alam, di Kampung Kuta masih ada nilai-nilai yang dipertahankan ini.

Masyarakat adat menjadi salah satu bagian yang penting dalam berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan perubahan bangsa Indonesia yang berkarakter mulia. Begitu pentingnya nilai-nilai peduli terhadap lingkungan hidup dimiliki oleh setiap individu sebagai modal pemangunan bangsa Indonesia guna tercipta bangsa yang beradab, bermartabat, dan berakhlakul karimah. Untuk itu maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **”Pembinaan Kesadaran Warga Negara Untuk Melestarikan Lingkungan Hidup (*The Living Environment*) Pada Masyarakat Adat Kuta”** (Studi Kasus di Kampung Kuta Ds.Karangpaningal Kec.Tambaksari Kab.Ciamis).

B. Identifikasi Masalah

Berdasar latar belakang masalah diatas, maka untuk membatasi penelitian ini maka peneliti memiliki indentifikasi masalah yang dapat dikemukakan, diantaranya sebagai berikut :

1. Berbagai bencana saat ini muncul di Indonesia seperti longsor, banjir, kebakaran hutan, *illegal logging*, pencemaran limbah, pencemaran polusi udara, dan lain-lain.

2. Kurangnya sinergi antara berbagai pihak dalam usaha penyelamatan lingkungan, baik antara warga negara (masyarakat) dengan pemerintah, ataupun antara pemerintah dan pemilik kebijakan.
3. Kerpibadian, sikap, karakter, cara pandang dan paradigma warga negara yang belum memiliki kesadaran dalam menyelamatkan lingkungan, masyarakat masih memposisikan diri sebagai penguasa alam bukan sebagai pelestari/ pengelola alam.
4. Munculnya gejala kelelahkarsaan manusia/ ketidakkuatan mentalitas masyarakat dalam mengelola lingkungan.
5. Sebagian besar masalah lingkungan hidup kita berakar dari kurangnya pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal.
6. Objek studi *civics*/ Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, social, ekonomi, agama, dan negara yang belum optimal diaplikasikan dalam berbagai lini kehidupan.
7. Konsep ESD (*Education for Sustainable Development*) di Indonesia masih dalam konsep perkembangan (proses), belum semuanya memahami akan pentingnya konsep pendidikan untuk pembangunan bangsa karena belum semua lini mensupportnya terutama dalam hal lingkungan hidup dan belum semua berkontribusi dalam pelaksanaan ESD ini terutama di Indonesia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti rumuskan suatu masalah pokok didalam penelitian ini yaitu: “bagaimana pembinaan kesadaran warga negara untuk melestarikan lingkungan hidup (*the living environment*) yang dikembangkan oleh masyarakat adat Kuta Desa Karangpaningal Kec. Tambaksari Kabupaten Ciamis?” Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja indikator kompetensi kewarganegaraan warga masyarakat Kuta untuk melestarikan lingkungan hidup yang dijabarkan dalam bentuk pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*disposition*)?
2. Bagaimana proses internalisasi nilai-nilai kompetensi kewarganegaraan diteruskan melalui pelestarian lingkungan hidup?
3. Bagaimana strategi/ pola/ cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Kuta untuk melestarikan lingkungan hidup berdasar pada pembangunan berkelanjutan?
4. Apa faktor-faktor determinan baik pendorong atau penghambat dalam membangun kesadaran masyarakat adat Kuta dalam pelestarian lingkungan hidup?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang pentingnya membina kesadaran melestarikan lingkungan alam yang masih dilaksanakan/dipertahankan oleh masyarakat Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

2. Tujuan khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Kesadaran masyarakat adat Kuta dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk melestarikan lingkungan hidup.
2. Proses penginternalisasian nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup di masyarakat adat kuta.
3. Strategi/ pola/ cara yang dilakukan oleh masyarakat adat Kuta dalam melestarikan lingkungan hidup berdasar pada pembangunan berkelanjutan.
4. Faktor-faktor determinan baik pendorong atau penghambat dalam membangun kesadaran masyarakat adat Kuta dalam pelestarian lingkungan hidup.

E. Penjelasan Istilah

Perlu adanya pembatasan pengertian dari berbagai istilah yang digunakan

dalam tesis ini. Pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran manusia berkaitan dengan alam yaitu mengenai pikiran, sikap dan perilaku manusia dalam menyikapi realitas kehidupan yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran baik secara formal ataupun informal serta melalui proses pembiasaan (habitiasi). Diperkuat oleh pendapat Bertens (2011), Abdul Hakam (2011), dan Sumaatmadja (2010) mempunyai kesamaan pandangan bahwa ada dua komponen penting dalam sikap dan jiwa yang memiliki peranan penting. Fungsi jiwa meliputi pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Sedangkan sikap jiwa adalah arah dari energi psikis umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya.
2. Manusia hidup di dalam lingkungan tidak hanya sebagai makhluk individu, melainkan sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, serta makhluk beragama yang senantiasa berkontribusi dalam lingkungan hidupnya (Sumaatmadja, 2010).
3. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, kultural, dan ekonominya berbeda dari kelompok masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan pengaturan hukum (Mariane, 2014, hlm. 57).
4. Nilai merupakan keyakinan yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk bertindak atas dasar pilihannya mana yang dianggap benar, dan mana yang menurutnya salah. Diperjelas oleh Mulyana (2006), dan Budimansyah, dkk (2004) menyatakan bahwa nilai (*value*) sebagai suatu ukuran, patokan, anggapan, keyakinan yang dianut oleh orang banyak (masyarakat) dalam suatu kebudayaan tertentu, sehingga muncul apa yang benar, pantas, luhur, dan baik untuk dikerjakan, dilaksanakan, atau diperhatikan. Sehingga seseorang mampu menampilkan dalam sikap, tindakan, dan pikiran.
5. Internalisasi adalah sebuah proses yang dialami seseorang dalam menerima dan menjadikan bagian milik dirinya sebagai sikap, cara mengungkapkan perasaan atau emosi, pemenuhan hasrat, nafsu,

keyakinan, norma-norma, nilai-nilai sebagaimana yang dimiliki individu dalam kelompoknya (Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989, hlm. 196-197).

6. Kearifan Lokal adalah pandangan dan pengetahuan lokal yang berasal dari budaya masyarakat, unik, memiliki hubungan dengan aklam dan sejarah yang panjang beradaptasi dengan sistem ekologi setempat, bersifat dinamis dan terbuka berdasarkan nilai-nilai ideal, dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Ruyadi, 2010).
7. ESD (*Education for Sustainable Development*). Arti pembangunan berkelanjutan berasal dari bahasa Inggris yaitu *sustainability*. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan manusiawi. Kebutuhan hayati yang paling esensial adalah udara, air, sinar matahari, pangan yang harus selalu tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan hidup sehat. (Brundtland dalam Supardi, 2003)
8. Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi (Kemendiknas 2010, hlm. 10). Dipertegas oleh Keraf (2012) mengemukakan bahwa alam dan seluruh isinya mempunyai harkat derajat dan nilai di tengah dan di dalam komunitas kehidupan di bumi.

F. Manfaat Penelitian

1. Segi Teori

Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi pengembang PKn khususnya pengembang kesadaran warga negara terhadap pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagaimana proses pembinaan nilai-

nilai kearifan lokal sebagai modal pembangunan bangsa yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis.

2. Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup.

3. Segi Praktik

Dapat meningkatkan kesadaran warga untuk ikut melestarikan lingkungan hidup.

4. Segi Isu Serta Aksi Sosial

Dapat menjadi panutan bagi lembaga lain untuk melakukan gerakan peduli lingkungan.

G. Struktur Organisasi Tesis

Pada penelitian yang penulis lakukan, agar alur penulisan lebih mudah dipahami dan jelas, maka tesis yang akan disusun memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, manfaat/ signifikansi penelitian, metode dan teknik penelitian, teknik pengumpulan data, tahap penelitian, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan subjek penelitian, dan sistematika penelitian. Bab *kedua*, memuat dan mengkaji tentang kajian pustaka mengenai kesadaran warga negara terhadap lingkungan, budaya/ kearifan lokal, lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan *Education Sustainable of Development* (ESD).

Bab *ketiga*, adalah metode penelitian yang memuat desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, instrumen penelitian, validitas data, Prosedur Penelitian, analisis data, teknik penelitian. Bab *keempat*, merupakan hasil temuan dan pembahasan penelitian meliputi deskripsi penelitian, bentuk kesadaran warga masyarakat, proses internalisasi nilai peduli lingkungan hidup, upaya pelestarian lingkungan hidup berwawasan pembangunan berkelanjutan, serta faktor pendorong dan penghambat dari keberhasilan pembinaan kesadaran masyarakat.

Bab *kelima* dari bab ini adalah penutup yakni mengenai simpulan baik umum dan khusus, implikasi serta rekomendasi.